



DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TENAGA KERJA DESA CIBANTENG KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR

Nuryadi¹, Nisa Lestari²

^{1,2}Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Nuryadi.408@gmail.com

Abstrak

Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik tidak saja negara-negara besar akan tetapi hampir seluruh negara di dunia. Rasanya tidak ada satu negarapun yang tidak terdampak pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama beberapa bulan di Indonesia tentunya telah menimbulkan krisis tidak hanya krisis kesehatan, namun juga krisis ekonomi. Keadaan demikian menyebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menjadi mimpi buruk, dapat dilakukan dengan adanya alasan *force majeure* akibat pandemi Covid-19, karena hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik telah disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, maupun yang belum disepakati. Namun hal tersebut merupakan *ultimum remedium* atau jalan terakhir dari penyelesaian masalah yang terjadi.

Kata kunci: Covid-19; Tenaga Kerja; PHK; *Force Majeure*; *Ultimum Remedium*

PENDAHULUAN

Saat ini, pandemi Covid-19 menjadi salah satu krisis kesehatan utama bagi setiap individu dari semua bangsa, benua, ras, dan kelompok sosial ekonomi. Kondisi Kesehatan masyarakat terkait penularan Covid-19 dibagi menjadi enam kelompok yaitu orang sehat (OS), orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang yang positif Covid-19 (Kemenkes RI, 2020).

Data 30 April 2020, Covid-19 telah dikonfirmasi pada 3.096.686 orang dengan kasus baru 72.955 di seluruh dunia, sedangkan angka kematian sekitar 9.859, sehingga total kematian karena Covid-19 sebanyak 223.198 orang. Angka tersebut meningkat jauh jika dibandingkan dengan data 28 April 2020 dimana jumlah penderita Covid-19 2.957.350 orang dengan jumlah kematian 207.961 orang (WHO, 2020).

Data 15 Mei 2020 di Indonesia didapatkan 16.496 terkonfirmasi Covid-19 dengan kasus baru 490 orang, 11.617 orang dalam perawatan, 3.803 dinyatakan sembuh, 1.076 meninggal. Sedangkan orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 262.919 dan pasien dalam pengawasan (PDP) sebesar 34.360 orang (Gugus Covid, 2020).

Penularan Covid-19 dari satu individu ke individu yang lain telah ditunjukkan dengan gejala demam, sakit tenggorokan, batuk, sesak nafas, dan ada beberapa individu yang

positif terkena Covid-19 tanpa gejala (Kemenkes RI, 2020). Penatalaksanaan Covid-19 saat ini bersifat suportif, dan kegagalan pernafasan menjadi penyebab utama mortalitas (Mehta, McAuley, Brown, Sanchez, Tattersall, & Manson, 2020).

Merespon pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), lalu physical distancing (jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter) sejak awal Maret 2020. Kebijakan itu telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan orang di Jabodetabek dan kota-kota besar. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah penumpang pada berbagai sarana transportasi mulai pesawat terbang, kereta api komuter, bus dan busway, angkot, taksi, taksi online, bajaj, hingga ojek dan ojek online (ojol). Namun pembatasan sosial yang berupa himbauan itu rupanya dianggap kurang efektif dalam mencegah penularan Covid-19. Oleh karena sebagian kantor dan industri tetap buka, dan didesak kebutuhan hidup, banyak kalangan yang tetap beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi. Akhirnya pada 10 April, atas persetujuan pemerintah pusat, dimulailah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Selanjutnya disusul Bodetabek beberapa hari kemudian, dan kota-kota besar lainnya.

Dengan adanya PSBB maka perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi, untuk kurun yang relatif lama, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Tulisan ini dibuat sebelum PSBB berakhir sehingga total kerugian secara presisi belum diketahui. Untuk mempermudah kalkulasi, analisis dimulai dari Jabodetabek, dengan asumsi pelaksanaan selama 1 bulan. Sedangkan apabila PSBB diperpanjang dan atau diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar, dan dapat diproyeksikan berdasar perbandingan waktu dan luasan area. Selanjutnya pembahasan kerugian dibagi dalam kelompok kerugian nasional, sektoral, corporate, maupun individual.

Penularan Covid-19 dari satu individu ke individu yang lain telah ditunjukkan dengan gejala demam, sakit tenggorokan, batuk, sesak nafas, dan ada beberapa individu yang positif terkena Covid-19 tanpa gejala (Kemenkes RI, 2020). Penatalaksanaan Covid-19 saat ini bersifat suportif, dan kegagalan pernafasan menjadi penyebab utama mortalitas (Mehta, McAuley, Brown, Sanchez, Tattersall, & Manson, 2020).

Respons yang diperlukan, seperti isolasi sosial, anjuran untuk tetap berada di rumah, karantina seluruh masyarakat, dan penutupan instansi pendidikan telah mengubah kehidupan sehari-hari secara tiba-tiba. Mahasiswa sebagai salah satu individu yang jumlahnya paling banyak di institusi pendidikan tentunya sangat merasakan dampak pandemi Covid-19, dimana sistem pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka baik di lingkungan kampus ataupun lahan praktek berubah menjadi daring. Kemudian Perumusan Masalahnya adalah “Bagaimana Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja di Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor?”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Kepustakaan, yaitu studi yang dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain dan juga menggunakan metode survei yang sumber dan

informasinya diperoleh oleh responden sebagai sampel penelitian menggunakan kuesioner atau kuesioner sebagai pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran *corona virus* ini sama seperti virus yang disebabkan oleh flu lainnya, seperti dari batuk dan bersin atau sentuhan orang yang terinfeksi. Virus corona telah menjadi topik utama diseluruh negara, viruscorona yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini menurut WHO sebagai Novel Coronavirus (2019-nCov) yang mulai terdeteksi pertama kalinya muncul di kota Wuhan, China. Yang berasal dari pasar *seafood* dan hewan yang dapat menyebar dari hewan ke manusia, dan manusia ke manusia. Penularan covid-19 ini dapat dari cairan saat bersin atau batuk, udara, kontak langsung, hewan dan dekat dengan pasien yang sudah terjangkit viruscorona. Masa inkubasi corona paling pendek selama 2-3 hari, sedangkan paling lama dapat mencapai 10 hingga 12 hari. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus tersebut untuk menjangkit dan menampilkan gejala-gejala awal, dan dalam masa ini virus corona masih dapat menular ke orang lain sehingga cukup sulit untuk mendeteksinya. Dan di kota wuhan sendiri dikutip dari *kemenkes.go.id* pada 21 Januari 2020 sudah ada 218 warga Tiongkok yang tertular viruscorona dan 4 orang meninggal dunia. Sehingga pada tanggal 23 Janurari 2020 Pemerintah Tiongkok menutup kota Wuhan karena jumlah korban tewas mencapai 17 jiwa. Serta semakin kemari virus corona berada di setiap negara. Secara global, angka kematian akibat penyakit covid-19 mencapai 165.759 jiwa, sementara pasien pasien covid-19 yang berhasil sembuh kini tercatat sebanyak 633.363 orang. Sementara di Indonesia terhitung pada tanggal 20 April 2020, sendiri total kasus positif corona telah mencapai 6.760 pasien. Angka tersebut terhitung setelah adanya tambahan kasus positif baru yang terkonfirmasi dalam 24 jam terakhir sebanyak 185 orang. Hingga saat ini, sebanyak 5.423 pasien positif corona masih menjalani perawatan, setara dengan 80,2% dari total kasus positif covid-19 di Indonesia.

Selanjutnya, kenaikan jumlah tidak hanya terjadi pada kasus konfirmasi positif COVID-19 tetapi juga pada jumlah pasien sembuh dan jumlah kematian. Pada tingkat nasional, jumlah akumulasi pasien sembuh mencapai 3518 pasien pada tanggal 14 Mei. Sementara itu walaupun jumlah pasien sembuh mengalami kenaikan, jumlah akumulasi kematian tidak mengalami penurunan atau terus mengalami kenaikan. Pada tanggal 13 Mei tercatat sebanyak 1.028 jiwa dan pada 14 Mei jumlahnya naik menjadi 1.043 jiwa. Dari jumlah kematian tersebut, persentase kematian karena virus COVID-19 paling banyak berada pada individu dari kelompok umur lebih dari 60 tahun yaitu 44,72% disusul dengan individu pada kelompok umur 46-59 tahun sebesar 39,6% (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, diakses pada tanggal 15 Mei 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok umur lansia dan pra lansia menjadi paling rentan mengalami kematian karena virus COVID-19.

Tak hanya dari segi kesehatan, wabah COVID-19 juga berdampak pada sektor lainnya, yaitu sosial dan ekonomi. Seperti pernyataan yang dipaparkan dalam salah satu video yang diunggah di kanal Youtube oleh Nas Das Official yang berjudul *Be Careful of The Next 2 Years*, yaitu pernyataan yang mengungkapkan COVID-19 tak hilang dimuka bumi

setidaknya selama 2 tahun yang berdampak pada kondisi sosial yaitu kemiskinan dan kehilangan pekerjaan, maka kedua hal tersebut bisa saja terjadi di Indonesia berdasarkan pemaparan studi berikut. Menurut studi yang dilakukan oleh Suryahadi et.al (2020) yang memprediksikan tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan meningkat di akhir tahun 2020 sehingga peningkatan tersebut akan menyebabkan sekitar 8 juta penduduk akan mengalami kemiskinan baru akibat wabah ini. Data estimasi ini didapatkan berdasarkan data Susenas bulan Maret dan September 2019. Selain itu terdapat data tingkat kemiskinan pada tahun 2006 dan 2007 untuk melihat pola yang ada, karena di tahun tersebut terjadi lonjakan kemiskinan dikarenakan naiknya harga minyak dunia. Sehingga diprediksi akhir tahun nanti tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan mencapai 9,7% yang sebelumnya pada September 2019 mencapai 9,22%. Prediksi peningkatan persentase kemiskinan juga berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Jika

Pertumbuhan ekonomi menurun 1% maka setidaknya akan menambah sekitar 1,4% persentase kemiskinan. Tak hanya berdasarkan data estimasi, keadaan di lapangan pun juga digambarkan demikian. Sekitar 2,8 juta orang telah kehilangan pekerjaan, dan proyeksi yang ada menunjukkan setidaknya 5,2 juta penduduk lainnya akan kehilangan pekerjaan saat pandemi menyebar. Oleh karena itu, KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) meminta pemerintah mengambil langkah tegas mengenai hal ini.

Setidaknya pemerintah sudah merencanakan pencairan dana sebesar 405 triliun rupiah untuk bantuan uang tunai, makanan, bantuan di bidang kesehatan, sosial dan juga pengembangan bisnis. Melihat krisis ini, Australia memandang perlu memberi bantuan kepada Indonesia, setidaknya memberikan pinjaman tanpa bunga karena walaupun Indonesia berhasil melewati krisis di tahun-tahun sebelumnya namun nampaknya keadaan kali ini cukup serius (Emma dan Natalia, 2020). Salah satu contoh kasus dari profesi yang terdampak adalah pengemudi ojek dan angkot dengan penurunan penghasilan sebesar 44%. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak. Di sisi lain, dengan ditutupnya toko dan kantor tentu berdampak pada pihak yang menjual barang dan makanan. Terjadi penurunan pembelian karena orang lebih memilih untuk berbelanja secara online. Oleh karena itu, bisa saja mereka, pihak yang minim pendapatan meninggalkan Jakarta namun mereka beresiko menyebarkan virus ke seluruh Indonesia. (Asia News Monitor, 2020). Pemerintah pun akhirnya membuat kebijakan Kartu Pra-Kerja untuk mengadakan pelatihan gratis dengan memprioritaskan bagi 3,7 pengangguran muda umur 18-24 tahun. Jadi pelatihan kerja ini berbasis digital dengan mengadakan kerjasama dengan perusahaan startup digital unicorn di Indonesia seperti Bukalapak, MaubelaJarapa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker. Hal ini dilakukan karena 90% dari total pencari kerja muda belum pernah mengikuti pelatihan sertifikasi dengan sebagian besar lulusan SMA. Distribusi kartu pra-kerja diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, daya saing, dan produktivitas mereka di tengah wabah COVID-19 ini. Sehingga diharapkan ini menjadi salah satu solusi mengenai banyaknya pengangguran akibat dari dampak pandemi ini (Asia News Monitor, 2020).

Selain itu, Pemerintah sejak awal telah menerbitkan beberapa peraturan Perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan covid-19. Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ditetapkan tanggal 31 Maret 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ditetapkan tanggal 31 Maret 2020, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 (ditetapkan tanggal 31 Maret 2020) yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang, yang diundangkan tanggal 16 Mei 2020.

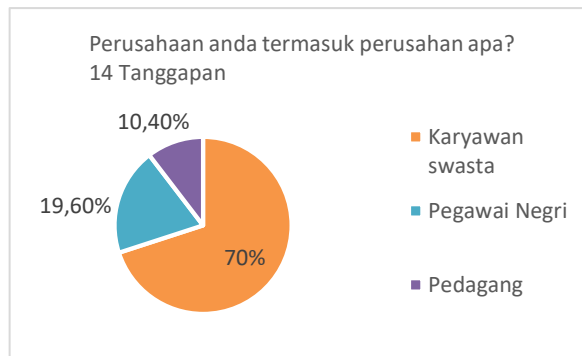
Kabupaten Bogor termasuk ke dalam 1 dari 5 kabupaten / kota yang memiliki peningkatan jumlah kasus terbesardan persebaran kasus terluas di wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi). Faktor utama tingginya peningkatan dan persebaran kasus tersebut adalah tingginya angka pergerakan orang, transportasi dan pekerjaan dari Kabupaten Bogor ke DKI Jakarta dan sebaliknya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai dampak dari pandemic COVID-19 terhadap aspek sosial ekonomi pada masyarakat di Rt 06 Rw 02 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Dalam hal ini peneliti telah melakukan survei di daerah rumah tempat tinggal peneliti terkait dampak covid-19 terhadap pekerjaan, berikut hasilnya:



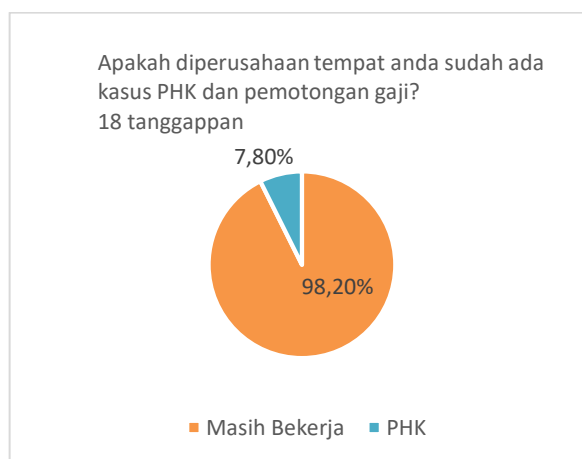
Gambar 1. Grafik kasus PHK

Dapat dilihat bahwa di Rt 06 Rw 02 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, sendiri belum banyak kasus PHK terhadap karyawannya. 58,2 persen menunjukkan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja belum ada nya kasus PHK dan pemotongan Gaji, dan 41,8 persen sudah ada kasus PHK dan pemotongan gaji, dengan perbedaan persentase yang hampir sama ini, dapat disimpulkan bahwa di Bogor sendiri kasus PHK belum banyak dilakukan.



Gambar 2. Grafik Perusahaan

Dan pada pertanyaan ini, 70 persen lebih banyak merupakan karyawan swasta, 19,6 persen bekerja menjadi pegawai negeri, dan 10,4 persen UMKM. Dalam hal ini dari 14 responden sebagian besar bekerja di perusahaan swasta.



Gambar 3. Grafik kasus PHK

Dari 18 responden, 98,2 persen menjawab khawatir akan pekerjaan mereka dikarenakan kasus pandemi corona yang terjadi sekarang, dan 1 orang yang menjawab biasa saja. Alasan yang diberikan responden cukup beragam namun merasa sangat khawatir dikarenakan merasa takut terdampak oleh pekerja lain yang sudah terinfeksi virus corona yang tidak memiliki gejala apapun, karena pekerjaannya yang berhadapan langsung dengan orang banyak.

Soal gaji yang terlambat dan pemotongan gaji, yang mungkin saja bulan berikutnya tidak mendapatkan penghasilan yang semestinya dikarenakan keuangan kantor yang sudah tidak stabil dan terus menurun, sedangkan masih banyaknya kebutuhan yang perlu dikeluarkan untuk keberlangsungan hidup mereka baik dirinya sendiri dan keluarga yang ditanggungnya. Terkait jam kerja walaupun dikurangi mereka merasa khawatir akan pemotongan gaji yang mungkin tidak mereka ketahui akan mendapatkan berapa persen dari gaji pokok utama mereka.

Pemasukan dan pengeluaran yang tidak stabil, dan menghambat pembuatan produksi suatu barang, sehingga mengganggu kegiatan ekspor yang dapat menjadi tidak stabil serta orderan yang semakin berkurang. Karena pandemi corona ini maka anggaran negara akan banyak dipakai untuk kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia,

sehingga bagi para pekerja honorer merasa resah dan takut di PHK karena tidak adanya anggaran. Dan sebagian bekerja di rumah namun tidak mendapatkan pendapatan apapun sehingga merasa resah akan keberlangsungan hidupnya pada masa pandemi ini.

Dalam menyikapi virus corona ini pemerintah memberikan kebijakan berupa bantuan bagi 6 juta buruh korban PHK dengan menggagalkan dana sebesar 10 triliun untuk dapat mengantisipasi jika terjadi lonjakan jumlah pengangguran akibat banyaknya perusahaan yang sudah melakukan pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi virus corona ini. Program tersebut akan direalisasikan dalam bentuk kartu Pra-kerja. Kartu Pra-kerja sendiri adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditunjukkan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Komite Cipta Kerja dibentuk melalui Presiden Nomor. 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu Prakerja.

Kartu Prakerja ini tidak hanya diberikan kepada yang sedang mencari pekerjaan, namun juga pada buruh, karyawan dan pegawai. Pemerintah sendiri sudah membuka pendaftaran kartu pra-kerja pada 11 April 2020, yang awalnya target penerima ini adalah untuk orang-orang yang belum bekerja, namun di masa pandemi virus corona ini kartu prakerja difokuskan kepada orang-orang yang telah di-PHK. Kartu pra-kerja ini sudah menjadi salah satu program pemerintah, yakni yang bertujuan untuk menyiapkan keahlian bagi para pencari kerja.

PHK sendiri telah dimulai oleh beberapa perusahaan dan akan terus menghantui banyak pekerja formal terutama yang bekerja di swasta, seperti survei peneliti di atas banyak yang telah merasa khawatir akan pekerjaan mereka. Data hingga 2019 jumlah pekerja formal Indonesia mencapai angka 55 juta dengan 4 juta pekerja yang merupakan pegawai negeri sipil. Sedangkan keahlian calon pekerja yang diharapkan dari kartu pra-kerja yang telah diterbitkan yakni untuk menyiapkan calon-calon pekerja untuk dapat diterima di perusahaan-perusahaan, namun pada saat pandemi wabah virus corona ini perekrutan para pekerja baru akan sulit terjadi.

Bagi para penerima kartu Pra-kerja akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp. 3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif. Dimana pembagiannya yakni untuk biaya insentif pelatihan sebesar Rp. 600.000/bulan (selama 4 bulan) dan insentif survei keberkerjaan sebesar Rp. 50.000/survei (akan ada 3 survei) dan setiap pemegang kartu pra-kerja akan menerima sekali bantuan untuk seumur hidup.

Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para pengangguran agar tetap mendapatkan penghasilan yakni dengan menjajal bisnis online, karena seperti yang kita tahu penerapan sistem *social distancing* membuat masyarakat akan sering berada di rumah atau di rumah saja. Tentu saja dalam hal ini para pembisnis offline akan sepi pembeli. Dalam hal ini bisa dilakukan menjadi seorang *re-seller* atau penjual langsung.

Membuka kelas online atau menjadi pengajar online, karena banyaknya sekolah dan universitas yang terpaksa harus diliburkan dan diganti dengan kelas online dapat kita manfaatkan hal ini dengan menjadi pengajar secara online tidak hanya seputar akademik, tetapi dalam bidang seni pun dapat kita lakukan, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Serta membuka usaha kecil-kecilan di rumah seperti menjual takjil dan makanan ringan lainnya pada suasana Ramadhan ini.

Sehingga dalam hal ini dapat menjadi keuntungan ekonomis dalam bonus demografi, yang merujuk pada semakin besar jumlah tabungan penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil ditengah pandemi corona saat ini. Artinya, ketika semakin banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja dan semakin sedikit pula anggota rumah tangga yang ditanggung sehingga dapat menciptakan kelebihan pendapatan yang dapat disimpan sebagai tabungan. Kondisi saat ini akan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menabung sehingga agregat tabungan diatas tingkat konsumsinya.

KESIMPULAN

Tidak ada satupun negara yang dapat memprediksi kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Cara sederhana beradaptasi dan menghadapi pandemi ini adalah dengan menyiapkan strategi-strategi jangka pendek dan jangka panjang sambil terus berharap vaksin virus COVID-19 segera ditemukan dan diproduksi massal. Kebijakan jangka pendek yang dapat diterapkan adalah bantuan keuangan baik dalam bentuk pinjaman lunak atau bantuan tunai langsung dengan melibatkan pemerintah dan sektor swasta.

Pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dan tak terkecuali Indonesia ini menimbulkan banyak tantangan. Tantangan tersebut berasal dari kesadaran oleh warga yang terdampak oleh pandemi itu sendiri. Secara demografis sendiri wabah COVID-19 ini berpengaruh pada jumlah mortalitas dari penduduk itu sendiri. Meskipun sudah diterapkan beberapa kebijakan seperti PSBB dan anjuran untuk tetap dirumah, namun masih banyak penduduk Indonesia yang tidak taat dan mengikuti kebijakan dan anjuran tersebut. Memang sebagian warga merasa resah karena kebebasan sipil nya untuk berkumpul dan juga bepergian sangat dibatasi, namun selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pendorong warga untuk tetap keluar rumah demi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dikarenakan masih ditemukan warga yang merasa bantuan dari Pemerintah masih kurang atau belum merata. Meskipun memang, lagi-lagi tindakan keluar rumah yang dilakukan oleh warga yang harus bekerja karena kebutuhan mendesak tersebut memang berpotensi untuk memperpanjang masa pandemi, namun bagi mereka, tidak ada pilihan lain yang dapat mereka lakukan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kunci dari penyehatan kembali kondisi ekonomi nasional adalah survival di tingkat individu dan entitas usaha. Oleh karena itu negara harus mengerahkan segenap upaya, termasuk dengan memberikan stimulus, agar rakyatnya tidak collaps semasa krisis, tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai, serta bisnis dapat terus berjalan. Yang diperlukan adalah kebijakan yang tepat, baik secara lokasi, waktu, maupun prosedurnya. Apabila PSBB dapat menjamin putusnya rantai penularan Covid- 19, maka lakukanlah dengan benar, dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pembatasan yang berkepanjangan, atau berpindah-pindah lokasi karena tidak serempak, berisiko melampaui batas kemampuan survival individu maupun entitas bisnis. Dan bila itu yang terjadi, maka penyelamatan tidak dapat dilakukan, dan kerugian akan semakin besar baik secara ekonomi maupun sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, P. (2020). *Polemik Lockdown di Tengah Kegelisahan Kaum Marjinal*. ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan, 29-34.
- Hadiwardoyo, W. (2020). *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19*. Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship, 83-92.
- Nabilla, S. (2020, April 23). *Survei kekhawatiran para pekerja saat terjadi wabah COVID-19*. (17, Pewawancara)
- BBC News Indonesia. (2020, April 21). *Dampak sosial virus corona: Beban 'berlipat ganda' bagi perempuan di masa pandemi Covid-19*. Diperoleh dari [bbc.com](https://www.bbc.com)
- Yasmin, P. (2020, April 6). Diambil kembali dari Detiknews.com: <https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-dari-mana-sebenarnya> (t.thn.). Diambil kembali dari Alodokter.com: <https://www.alodokter.com/terapkan-physical-distancing-saat-ini-juga>
- Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Sanjaya, sebagai Ketua RT 06 RW 02 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
- kompas.com. (2020, April 7). Diambil kembali dari Nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/07/11062471/jokowi-minta-kartu-pra-kerja-diprioritaskan-bagi-korban-phk-akibat-covid-19>
- Liputan6.com. (2020, April 22). *Nekat Nongkrong Saat Pandemi Corona Covid-19, ABG Dihukum Dorong Motor*. Diperoleh dari Liputan 6:
- Idhom, A. M. (2020, Maret 8). Diambil kembali dari Tirto.id: <https://tirto.id/kronologi-pasien-positif-corona-di-indonesia-bertambah-jadi-enam-eDeN>
- Azanella, L. A. (2020, April 1). Diambil kembali dari kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/160000765/5-kebijakan-jokowi-tangani-covid-19-gratiskan-tarif-listrik-hingga?page=all>
- Brataa, J. (2020, Februari 12). Diambil kembali dari Beritajatim.com: <https://beritajatim.com/peristiwa/400-bencana-terjadi-sepanjang-tahun-2020/>
- Harsono, F. H. (2019, Oktober 20) Diambil kembali dari Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/health/read/4090717/jokowi-bonus-demografi-adalah-tantangan-dan-kesempatan-besar>
- Santoso, Yusuf Imam. "Menghitung dampak Covid-19 terhadap dunia usaha hingga UMKM." Kontan.co.id. Diakses 22 April 2020.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-dampak-covid-19-terhadap-dunia-usaha-hingga-umkm?page=all>.
- Ini Daftar Stimulus Ekonomi untuk Redam Dampak Corona", 14 Maret 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/03/14/094137626/ini-daftar-stimulus-ekonomi-untuk-redam-dampak-corona?page=all>, diakses 15 Maret 2020.
- Kemenkop Catat 21 Koperasi dan UMKM Terdampak Virus Corona, 19 Maret 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4205778/kemenkop-catat-21-koperasi-dan-umkm-terdampak-virus-corona>, diakses 22 Maret 2020
- Elena, M. (2020, April 15). Diambil kembali dari Ekonomi.bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200415/9/1227629/dampak-pandemi-covid-19-ini-sektor-sektor-yang-rentan-kena-phk>

Paceklik Akibat Covid, 7 Maret 2020, <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159886/babak-belur-pariwisata-lokal-gara-gara-corona?> diakses 11 Maret 2020.

Elen, T. (2020, April 21). news.detik.com: <https://news.detik.com/kolom/d-4985239/kartu-pra-kerja-solusi-korban-phk-di-masa-corona>

Moody's Prediksi Ekonomi Indonesia Melambat di 4,8% Akibat Corona, 9 Maret 2020, <https://tirto.id/moodys-prediksi-ekonomi-indonesia-melambat-di-48-akibat-corona-eDPW>, diakses 9 Maret 2020.

Virus Korona Bikin Demam Dunia Usaha, <https://epaper.kontan.co.id/news/663865/Virus-Korona-Bikin-Demam-Dunia-Usaha>, diakses 8 Maret 2020.

Asmini, I Nyoman Utama, Wahyu Haryadi, Rosyda Rachman, "Manajemen business cycle sebagai basis peluang usaha pasca covid – 19: suatu strategi pemulihan ekonomi masyarakat"

Detik.com, 2020. Jumlah Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Naik Jadi 1,5 juta <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4973759/jumlah-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-naik-jadi-15-juta>. [Online] Tersedia: [11 April 2020].

<https://www.cermati.com/artikel/phk-besar-besaran-dan-sepinya-lowongan-kerja-karena-covid-19-apa-yang-harus-dilakukan>